

# DAMPAK KEBIJAKAN PEMBATASAN IMPOR BAWANG MERAH TERHADAP USAHATANI BAWANG MERAH DI KABUPATEN PROBOLINGGO

Policy Impact of Import Restriction of Shallot on Farm in Probolinggo District

**Mohammad Wahyudin, Mochammad Maksum, Henry Yuliando**

Jurusan Teknologi Industri Pertanian, Fakultas Teknologi Pertanian, Universitas Gadjah Mada  
Jl. Flora No.1, Bulaksumur, Yogyakarta 55281  
Email: moch.wahyudin@yahoo.com

## ABSTRAK

Pada Januari - Agustus 2013, pemerintah menerapkan kebijakan pembatasan impor berbasis kuota terhadap komoditas bawang merah. Selanjutnya, pada September 2013 pemerintah mengubah kebijakan tersebut menjadi pembatasan impor berbasis harga. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana dampak kebijakan pembatasan impor berbasis kuota dan berbasis harga terhadap proteksi, profitabilitas, dan efisiensi usahatani bawang merah. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode *Policy Analysis Matrix* (PAM). Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan pembatasan impor berbasis kuota telah menyebabkan proteksi, profitabilitas, dan efisiensi usahatani bawang merah meningkat 141%, 270%, dan 32%. Sedangkan kebijakan pembatasan impor berbasis harga menyebabkan proteksi dan profitabilitas usahatani turun 46% dan 233%, dan efisiensi usahatani meningkat 1%.

**Kata kunci:** Dampak kebijakan, pembatasan impor, bawang merah, PAM, Probolinggo

## ABSTRACT

In January - August 2013, the government implemented a quota-based import restriction policy for the shallot. While on September 2013, the government then changed it into a price-based import restriction. This research aims to determine how the impact of the quota-based and price-based import restrictions to the level of protection, profitability, and efficiency of farm. The method of analysis used in this research is PAM (Policy Analysis Matrix) method. The results showed that the quota-based import restriction policy has increased 141%, 270%, and 32% of protection, profitability, and efficiency of shallot farming, respectively. The price-based import restriction policy has decreased 46% and 233% of protection and profitability of shallot farming, however it has increased 1% of the efficiency.

**Keywords:** Policy impact, import restriction, shallot, PAM, Probolinggo

## PENDAHULUAN

Bawang merah (*allium ascalonicum*) merupakan salah satu komoditas hortikultura yang memiliki potensi ekonomi tinggi sehingga membuat para petani di Indonesia tertarik untuk membudidayakannya. Menurut Rachmat (2013), potensi produksi bawang merah di Indonesia bisa mencapai 20 ton/ha. Namun, fakta yang terjadi ternyata berbeda. Dalam kurun waktu satu dekade ini, produksi bawang merah Indonesia masih berada pada angka 9,9 ton/ha. Pada

tahun 2010, Indonesia hanya mampu memproduksi bawang meran sebesar 1.048.228 ton, kemudian pada tahun 2011 dan 2012 produksi bawang merah mengalami penurunan menjadi 893.124 ton dan 964.221 ton. Sedangkan kebutuhan bawang merah nasional sejak tahun tahun 2010 hingga 2013 mengalami peningkatan secara berturut-turut, yaitu sebesar 976.284 ton, 1.046.325 ton, 1.060.820 ton (BPS dan Dirjen Holtikultura, 2013). Apabila dirata-rata sejak tahun 2005-2012, Indonesia mengalami defisit bawang merah sebesar 66.623 ton per tahun.

Tabel 1. Produksi dan kebutuhan bawang merah nasional tahun 2005 – 2012

Tahun	Produksi (Ton)	Kebutuhan (Ton)	Selisih (Ton)
2005	732.610	847.883	-115.273
2006	794.931	876.117	-81.186
2007	802.810	909.853	-107.043
2008	853.615	934.301	-80.686
2009	965.164	936.103	29.061
2010	1.048.228	976.284	71.944
2011	893.124	1.046.325	-153.201
2012	964.221	1.060.820	-96.599

Sumber : BPS (2013) dan Dirjen Holtikultura (2013)

Tabel 2. Volume ekspor-impor bawang merah

Tahun	Ekspor		Impor	
	Volume (Ton)	Nilai (US\$)	Volume (Ton)	Nilai (US\$)
2009	12.822	4.347,61	67.330	28.942.310
2010	3.234	1.814,4	73.270	33.861.550
2011	13.792	6.594,47	160.467	77.443.940
2012	12.647	8.812,03	122.191	54.479.600

Sumber: Dirjen Holtikultura (2013)

Untuk memenuhi kebutuhan bawang merah masyarakat Indonesia diluar musim panen maka pemerintah melakukan impor bawang merah. Volume dan nilai importasi bawang merah pada tahun 2009-2011 mengalami peningkatan. Pada tahun 2009, volume impor bawang merah hanya sebesar 67.330 ton, selanjutnya tahun 2010 meningkat menjadi 73.270 ton dan pada tahun 2011 kembali meningkat menjadi 160.467 ton. Adanya kecenderungan meningkatnya arus importasi bawang merah tersebut direspon oleh pemerintah dengan melakukan langkah antisipatif berupa diterapkannya kebijakan pembatasan impor bawang merah masuk ke Indonesia. Namun sayangnya, kebijakan tersebut tidak dibarengi dengan upaya yang intensif dan masif untuk meningkatkan produktivitas bawang merah nasional. Sehingga hasilnya bisa ditebak bahwa kebijakan pembatasan importasi yang diterapkan tidak dapat bertahan lama serta tidak memberikan dampak positif yang signifikan dan berkelanjutan terhadap iklim bisnis bawang merah di Indonesia.

Pada awal tahun 2013 pemerintah menerapkan kebijakan pembatasan impor produk hortikultura berbasis kuota yang diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian (PERMENTAN) No.60/PERMENTAN/OT.140/9/2012 dan No.47/PERMENTAN/OT.140/4/2013. Pembatasan impor berbasis kuota merupakan kebijakan pembatasan impor yang didasarkan atas kemampuan produksi dalam negeri

untuk memenuhi kebutuhan domestik, selisih antara jumlah produksi dengan jumlah kebutuhan dalam negeri itulah yang menjadi dasar dalam menentukan batas maksimum jumlah impor yang diizinkan.

Penerapan kebijakan pembatasan impor berbasis kuota memberikan dampak terhadap fluktuasi harga bawang merah domestik yang sangat signifikan. Pada Desember 2012, di tingkat pengecer bawang merah masih diharga Rp. 16.507/kg, selanjutnya harga naik signifikan menjadi Rp. 41.562/kg pada April 2013, dan Rp.60.295/kg pada Agustus 2013 (Kementerian Perdagangan, 2014). Kenaikan harga yang signifikan pada bawang merah tersebut menimbulkan keresahan dikalangan konsumen dan memicu terjadinya inflasi nasional. Dengan alasan tersebut, pada bulan September 2013 pemerintah mengambil kebijakan baru dengan mengubah kebijakan pembatasan impor berbasis kuota menjadi pembatasan impor berbasis harga referensi, yang diatur dalam PERMENTAN Nomor 86/PERMENTAN/OT.140/8/2013. Harga referensi yang diterapkan oleh pemerintah adalah sebesar Rp. 25.700/kg di tingkat pengecer. Pasca diberlakukannya kebijakan pembatasan impor berbasis harga referensi, harga bawang merah turun menjadi Rp. 33.873/kg pada bulan September dan Rp. 31.445/kg pada bulan Desember 2013 (Kementerian Perdagangan, 2014).

Namun demikian, penetapan harga referensi sebesar Rp. 25.700/kg di tingkat pengecer yang ditetapkan oleh pemerintah tersebut mendapat respon negatif dari Dewan Bawang Merah Nasional (DEBNAS). Menurut mereka, harga referensi tersebut tidak berpihak kepada petani. Harga referensi tersebut didapatkan dengan memperhitungkan harga di tingkat petani yang ditambah dengan biaya distribusi, penyusutan, transportasi, bongkar muat dan angkutan, keuntungan di tingkat pengepul di pasar induk dan pasar tradisional, serta memperhitungkan koefisien keragaman harga. Harga bawang merah di tingkat petani diperhitungkan sebesar Rp. 11.935/kg yang didapat dari harga balik modal petani (BEP) Rp. 8.525/kg dan ditambah keuntungan sebesar 40%. Harga tersebut tidak menguntungkan petani, karena selama awal hingga pertengahan tahun 2013 harga input usahatani bawang merah, terutama bibit dan pestisida, mengalami kenaikan harga sebagai konsekuensi dari kenaikan harga bawang merah pada saat itu.

Berdasarkan latar belakang diatas, penelitian ini memiliki rumusan tujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh kebijakan pembatasan impor berbasis kuota dan berbasis harga referensi tersebut terhadap terhadap tingkat proteksi, profitabilitas, dan efisiensi usahatani bawang merah. Penilaian terhadap dampak kebijakan memungkinkan untuk melakukan penyesuaian strategi yang telah ditetapkan apabila diperlukan dalam rangka pencapaian tujuan dari sebuah kebijakan, yaitu untuk melindungi konsumen dan para petani.

**METODE PENELITIAN**

Penelitian dilakukan di Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur. Kabupaten Probolinggo merupakan salah satu sentra bawang merah terbesar di Provinsi Jawa Timur. Penelitian lapangan dilaksanakan pada bulan Desember 2013 hingga Februari 2014. Pengambilan petani sampel dilakukan dengan menggunakan teknik *purposive sampling*. Petani yang dipilih adalah petani yang memiliki lahan lebih dari 1 hektar dan melakukan pencatatan atau pembukuan atas usahatani bawang merah.

Analisis terhadap dampak kebijakan dilakukan dengan menggunakan pendekatan *Policy Analysis Matrix* (PAM). Tahapan analisis sebagai berikut: (1) identifikasi struktur input yang digunakan dan output yang dihasilkan dalam usahatani bawang merah; (2) estimasi biaya input (*tradeables* dan *non-tradeables*) dan pendapatan aktual usahatani bawang merah; (3) menghitung nilai harga bayangan input, output, dan nilai tukar rupiah terhadap US\$, (4) estimasi biaya input (*tradeables* dan *non-tradeables*) dan pendapatan bayangan usahatani bawang merah; (5) analisis dampak kebijakan terhadap proteksi, profitabilitas, dan efisiensi usahatani bawang merah.

Dampak kebijakan pemerintah terhadap tingkat proteksi usahatani bawang merah dilihat melalui analisis nilai

*Nominal Protection Coefficient on Input* (NPCI), *Nominal Protection Coefficient on Output* (NPCO), dan *Effective Protection Coefficient* (EPC). Dampak kebijakan terhadap tingkat profitabilitas usahatani dilihat melalui analisis nilai *Profitability Coefficient* (PC). Adapun dampak kebijakan terhadap tingkat efisiensi usahatani dilihat melalui analisis *Private Cost Ratio* (PCR).

**HASIL DAN PEMBAHASAN**

Analisis terhadap dampak kebijakan dapat dilakukan dengan menggunakan pendekatan *Policy Analysis Matrix* (PAM) yang dikembangkan oleh Monke dan Pearson (1989). Dalam penelitian ini, analisis PAM terhadap usahatani bawang merah dilakukan pada saat sebelum dan setelah adanya kebijakan, yaitu pada tahun 2012 dan tahun 2013. Hal tersebut dilakukan untuk mengetahui seberapa besar perubahan antara sebelum dan setelah diberlakukannya kebijakan pembatasan impor. Matrik PAM dibuat berdasarkan periode tanam bawang merah di Kabupaten Probolinggo, yaitu periode tanam I (Januari-April), periode tanam II (Mei-Agustus), dan periode tanam III (September-Desember).

Tabel 3. Matriks PAM usahatani bawang merah Kabupaten Probolinggo tahun 2012

	Pendapatan	Biaya		Keuntungan
		<i>Tradables</i>	<i>Non-Tradables</i>	
<b>Periode Tanam I (Jan-April)</b>				
Privat (Aktual)	68.652.892,56	19.666.393,36	23.660.088,40	25.326.410,80
Sosial (Bayangan)	49.013.496,14	16.757.141,23	23.451.585,50	8.804.769,41
Divergensi	19.639.396,42	2.909.252,13	208.502,90	16.521.641,39
<b>Periode Tanam II (Mei-Agst)</b>				
Privat (Aktual)	75.219.398,53	25.365.630,51	23.699.719,78	26.154.048,24
Sosial (Bayangan)	85.343.625,34	21.243.297,18	23.437.768,20	40.662.559,96
Divergensi	(10.124.226,81)	4.122.333,33	6.387.304,00	(14.508.511,72)
<b>Periode Tanam III (Sept-Des)</b>				
Privat (Aktual)	75.916.845,70	29.825.072,20	22.508.488,28	23.583.285,22
Sosial (Bayangan)	46.450.624,51	17.947.962,28	22.026.481,78	6.476.180,45
Divergensi	29.466.221,19	11.877.109,92	482.006,50	17.107.104,77
<b>Rerata per Tahun</b>				
Privat (Aktual)	73.263.045,60	24.952.365,36	23.289.432,15	25.021.248,09
Sosial (Bayangan)	60.269.248,66	18.649.466,90	22.971.945,16	18.647.836,61
Divergensi	12.993.796,93	6.302.898,46	2.359.271,13	6.373.411,48

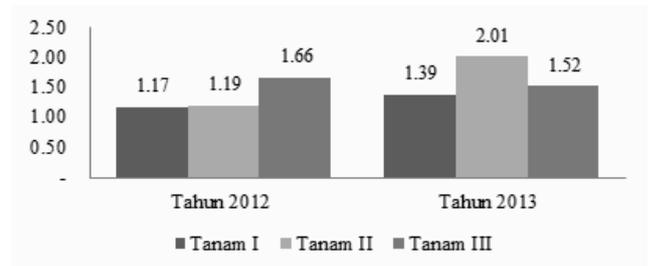
Tabel 4. Matriks PAM usahatani bawang merah Kabupaten Probolinggo tahun 2013

	Pendapatan	Biaya		Keuntungan
		Tradables	Non-Tradables	
<b>Periode Tanam I (Jan-April)</b>				
Privat (Aktual)	100.152.949,95	28.697.288,67	23.242.477,75	46.631.129,27
Sosial (Bayangan)	52.561.164,59	20.716.923,00	22.925.894,13	8.918.347,46
Divergensi	47.591.785,36	7.980.365,67	316.583,62	37.712.781,81
<b>Periode Tanam II (Mei-Agst)</b>				
Privat (Aktual)	277.738.751,15	55.849.588,27	23.495.951,36	199.464.151,61
Sosial (Bayangan)	104.674.682,07	27.743.943,41	22.701.944,96	54.228.793,70
Divergensi	173.064.069,08	28.105.644,86	794.006,40	145.235.357,91
<b>Periode Tanam III (Sept-Des)</b>				
Privat (Aktual)	87.596.191,41	40.966.820,27	22.394.536,73	23.930.001,61
Sosial (Bayangan)	67.007.780,35	26.890.006,22	21.888.639,43	18.229.134,70
Divergensi	20.588.411,06	14.076.814,05	505.897,30	5.700.866,91
<b>Rerata per Tahun</b>				
Privat (Aktual)	155.162.630,84	41.837.899,07	23.044.321,95	90.008.427,50
Sosial (Bayangan)	74.747.875,67	25.116.957,54	22.505.492,84	27.125.425,29
Divergensi	80.414.755,17	16.720.941,53	538.829,11	62.883.002,21

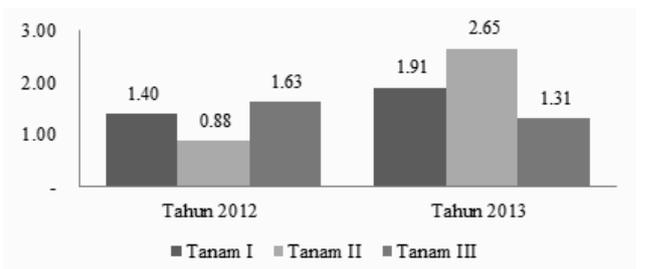
Pendapatan aktual usahatani bawang merah di Kabupaten Probolinggo, rata-rata, sebesar Rp. 73.263.046/ha pada tahun 2012, dan meningkat menjadi Rp. 155.162.630,84/ha pada tahun 2013. Adapun pendapatan sosial atau bayangannya, rata-rata, sebesar Rp. 60.269.249/ha, kemudian meningkat menjadi Rp. 74.747.876/ha pada tahun 2013. Pada sisi biaya, biaya aktual (*tradables* ditambah *non-tradables*) yang dikeluarkan oleh petani pada tahun 2013, rata-rata, sebesar Rp. 48.241.798/ha, selanjutnya meningkat menjadi Rp. 64.882.221/ha pada tahun 2013. Adapun biaya bayangannya, rata-rata, adalah sebesar Rp. 41.621.412/ha, dan meningkat menjadi Rp. 47.622.450/ha pada tahun 2013.

**Dampak Kebijakan**

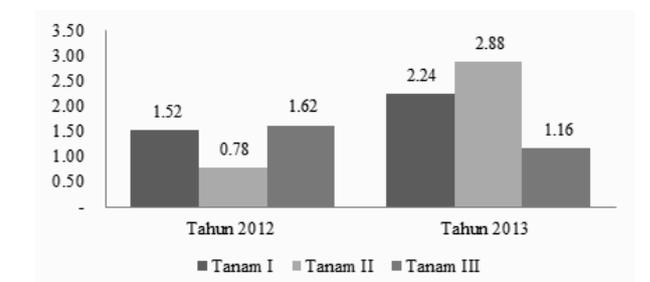
**Dampak terhadap proteksi usahatani.** Dampak kebijakan pemerintah terhadap tingkat proteksi usahatani dapat dibagi menjadi tiga, yaitu dampak terhadap proteksi input usahatani, dampak terhadap proteksi output (hasil) usahatani, dan dampak terhadap proteksi input-output usahatani secara simultan. Dampak kebijakan pembatasan impor terhadap proteksi tersebut dianalisis melalui nilai *Nominal Protection Coefficient on Input* (NPCI), *Nominal Protection Coefficient on Output* (NPCO), dan *Effective Protection Coefficient* (EPC) sebelum dan setelah diterapkannya kebijakan.



Gambar 1. Nilai NPCI sebelum dan setelah kebijakan



Gambar 2. Nilai NPCO sebelum dan setelah kebijakan



Gambar 3. Nilai EPC sebelum dan setelah kebijakan

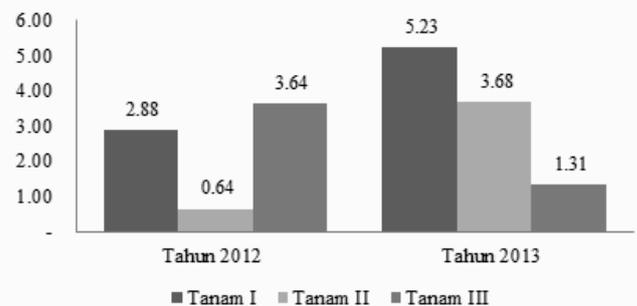
Pada Gambar 1 terlihat bahwa pada tahun 2012 dan tahun 2013 (sebelum dan setelah ada kebijakan pembatasan impor nilai NPCI lebih besar dari satu ( $NPCI > 1$ ), artinya harga input *tradables* di pasar domestik lebih tinggi daripada harga bayangannya (harga efisiennya). Apabila dibandingkan antara sebelum dan sesudah adanya kebijakan dapat dijelaskan bahwa bahwa pada periode tanam I dan tanam II tahun 2013 telah mengalami peningkatan sebesar 0,22 dan 0,82 poin dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2012. Adapun kebijakan pembatasan impor berbasis harga referensi, yang mulai berlaku pada periode tanam III tahun 2013, membuat nilai NPCI turun sebesar 0,14 poin (dibandingkan periode tanam III tahun 2012). Artinya, kebijakan pembatasan impor berbasis kuota telah menyebabkan tingkat proteksi terhadap input *tradables* turun 43%, sedangkan pembatasan impor berbasis harga referensi membuat proteksi terhadap input *tradables* naik 8%.

Selanjutnya untuk nilai NPCO, Gambar 2, menjelaskan bahwa penerapan kebijakan pembatasan impor berbasis kuota menyebabkan nilai NPCO mengalami peningkatan sebesar 0,51 dan 1,77 poin. Adapun kebijakan pembatasan impor berbasis harga referensi membuat nilai NPCO turun sebesar 0,32 poin. Artinya, kebijakan pembatasan impor berbasis kuota telah menyebabkan tingkat proteksi terhadap output usahatani bawang merah naik sebesar 118%, sedangkan pembatasan impor berbasis harga referensi membuat proteksi terhadap output usahatani bawang merah turun sebesar 21%.

Adapun nilai EPC, Gambar 3 menggambarkan sejauh mana seluruh kebijakan pemerintah yang ada bersifat melindungi atau menghambat suatu sistem komoditas. Apabila nilai EPC lebih besar dari satu ( $EPC > 1$ ) artinya kebijakan pemerintah memberikan dukungan terhadap aktivitas produksi bawang merah dalam negeri sehingga biaya usahatani menjadi lebih kecil dari biaya yang seharusnya. Sebaliknya, apabila nilai EPC kurang dari satu ( $EPC < 1$ ) maka kebijakan pemerintah tidak berjalan efektif, sehingga biaya usahatani lebih tinggi dari biaya yang seharusnya.

Penerapan kebijakan pembatasan impor berbasis kuota telah membuat nilai EPC meningkat sebesar 0,72 dan 2,10 poin. Adapun kebijakan pembatasan impor berbasis harga referensi, yang mulai berlaku pada periode tanam III tahun 2013, membuat nilai EPC turun sebesar 0,46 poin. Dengan demikian, dapat dijelaskan bahwa adanya kebijakan pembatasan impor berbasis kuota telah berdampak pada meningkatnya proteksi terhadap (input-output) usahatani bawang merah sebesar 141%, sedangkan kebijakan pembatasan impor berbasis harga referensi menyebabkan proteksi terhadap usahatani bawang merah turun sebesar 46% dibandingkan periode tanam yang sama pada tahun 2012.

**Dampak terhadap profitabilitas usahatani.** Dampak kebijakan pemerintah terhadap tingkat profitabilitas usahatani bawang merah dapat dilihat melalui analisis nilai *Profitability Coefficient* (PC), yaitu perbandingan antara keuntungan bersih yang benar-benar diterima produsen dengan keuntungan bersih bayangannya. Apabila nilai PC lebih besar dari satu ( $PC > 1$ ) maka secara keseluruhan kebijakan pemerintah memberikan insentif kepada produsen, sehingga keuntungan finansial lebih besar dari keuntungan ekonominya. Sebaliknya, jika PC lebih kecil dari satu ( $PC < 1$ ) berarti kebijakan pemerintah mengakibatkan keuntungan finansial lebih kecil dibandingkan keuntungan sosialnya.

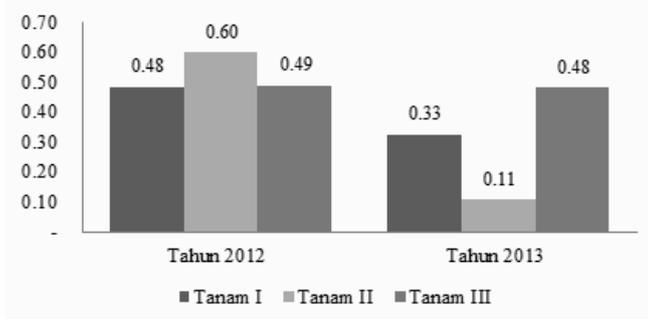


Gambar 4. Nilai *Profitability Coefficient* sebelum dan setelah kebijakan

Berdasarkan data yang tersaji dalam Gambar 4 dapat dijelaskan bahwa penerapan kebijakan pembatasan impor berbasis kuota dan berbasis harga telah membuat keuntungan usahatani lebih tinggi dari keuntungan yang seharusnya dalam kondisi persaingan sempurna, hal tersebut terlihat dari nilai PC yang lebih besar dari satu. Namun demikian, apabila dibandingkan dengan nilai PC pada tahun 2012 (sebelum diterapkan kebijakan pembatasan impor), dapat dijelaskan bahwa penerapan kebijakan pembatasan impor berbasis kuota telah menyebabkan nilai PC menjadi naik sebesar 2,35 dan 3,04 poin. Adapun pembatasan impor berbasis harga referensi membuat nilai PC turun sebesar 2,33 poin. Hal tersebut menunjukkan bahwa adanya kebijakan pembatasan impor berbasis kuota telah menyebabkan profitabilitas usahatani bawang merah meningkat hingga mencapai 270%. Adapun kebijakan pembatasan impor berbasis harga referensi membuat profitabilitas usahatani bawang merah turun sebesar 233%.

**Dampak terhadap efisiensi usahatani.** Dampak kebijakan pemerintah terhadap tingkat profitabilitas usahatani bawang merah dapat dilihat melalui analisis nilai *Private Cost Ratio* (PCR), yaitu perbandingan antara biaya faktor domestik (*input non tradables*) dengan nilai tambah output dari biaya input *tradables* pada harga privat (finansial). Nilai rasio biaya privat (PCR) menunjukkan tingkat kemampuan sebuah sistem usahatani untuk membayar biaya sumberdaya domestik secara efisien sehingga tetap kompetitif. Rasio ini

juga dapat digunakan sebagai indikator untuk mengukur keuntungan maksimum dari sebuah usahatani. Sebuah usahatani dikatakan efisien atau kompetitif apabila nilai PCR lebih kecil dari satu ( $PCR < 1$ ), semakin kecil nilai PCR maka komoditas tersebut memiliki tingkat efisiensi atau keunggulan kompetitif yang semakin tinggi. Apabila nilai PCR lebih besar dari satu ( $PCR > 1$ ), artinya sistem usahatani tidak efisien atau tidak memiliki keunggulan kompetitif.



Gambar 5. Nilai PCR sebelum dan setelah kebijakan

Gambar 5 menjelaskan bahwa penerapan kebijakan pembatasan impor berbasis kuota dan berbasis harga telah membuat sistem usahatani bawang merah menjadi efisien atau memiliki keunggulan kompetitif. Hal tersebut terlihat dari nilai PCR yang lebih kecil dari satu. Namun demikian, apabila dibandingkan dengan nilai PCR pada tahun 2012 (sebelum diterapkan kebijakan pembatasan impor), dapat dilihat bahwa nilai PCR pada tahun 2013 mengalami peningkatan. Penerapan kebijakan pembatasan impor berbasis kuota (selama periode tanam I dan II tahun 2013) menyebabkan nilai PCR turun sebesar 0,32 poin. Adapun kebijakan pembatasan impor berbasis harga referensi (selama periode tanam II tahun 2013) membuat nilai PCR turun sebesar 0,01 poin. Hal tersebut menunjukkan bahwa dengan adanya kebijakan pembatasan impor berbasis kuota maka tingkat efisiensi usahatani bawang merah menjadi naik sebesar 32%. Kebijakan pembatasan impor berbasis harga referensi menyebabkan tingkat efisiensi usahatani naik sebesar 1%.

## KESIMPULAN DAN SARAN

Penerapan kebijakan pembatasan impor bawang merah, baik yang berbasis kuota maupun berbasis harga, sama-sama memberikan proteksi, profit, dan efisiensi terhadap usahatani bawang merah di Kabupaten Probolinggo. Penerapan kebijakan pembatasan impor berbasis kuota telah membuat proteksi, profitabilitas, dan efisiensi usahatani bawang merah meningkat sebesar 141%, 270%, dan 32%. Sementara, pembatasan impor berbasis harga menurunkan proteksi dan profitabilitas usahatani sebesar 46% dan 233%, dan hanya mampu meningkatkan efisiensi sebesar 1%.

Dalam rangka melindungi petani bawang merah, sebaiknya pemerintah kembali menerapkan kebijakan pembatasan impor berbasis kuota karena pembatasan berbasis kuota lebih menguntungkan bagi petani dibandingkan pembatasan impor berbasis harga. Namun demikian, apabila pemerintah ingin mempertahankan kebijakan pembatasan impor berbasis harga, maka sebaiknya harga referensi yang ditetapkan didasarkan pada harga aktual di tingkat petani, bukan harga di tingkat pengecer. Lebih lanjut, kebijakan pembatasan impor harus juga iringi dengan upaya peningkatan produktivitas bawang merah secara intensif dan masif supaya dapat memberikan dampak positif yang signifikan dan berkelanjutan terhadap iklim bisnis bawang merah Indonesia kedepan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ariningsih, E. dan Tentamia, M.K. (2004). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penawaran dan Permintaan Bawang Merah di Indonesia*. ICASERD Working Paper No. 34.
- Badan Pusat Statistik (2013). Luas panen, produksi dan produktivitas bawang merah. [http://www.bps.go.id/tab\\_sub/view.php?kat=3&tabel=1&daftar=1&id\\_subyek=55&notab=61](http://www.bps.go.id/tab_sub/view.php?kat=3&tabel=1&daftar=1&id_subyek=55&notab=61). [25 November 2013].
- BPS Kabupaten Probolinggo (2012). *Kabupaten Probolinggo dalam angka*. Kabupaten Probolinggo.
- BPS Kabupaten Probolinggo (2013). *Kabupaten Probolinggo dalam angka*. Kabupaten Probolinggo.
- Direktorat Jenderal Holtikultura (2013). Volume dan nilai ekspor dan impor sayuran, tahun 2010-2012. <http://www.holtikultura.go.id>. [30 Oktober 2013].
- Histifarina, D. dan Musaddad, D. (1998). Pengaruh cara pelayuan daun, pengeringan dan daya simpan bawang merah. *Jurnal Hortikultura* 8(1):1036-1047.
- Kementerian Perdagangan (2014). Tinjauan pasar bawang merah, edisi: Januari 2014. [Ews.kemendag.go.id/download.aspx?file=131002\\_ANL\\_PBK\\_Bawang+Merah+Rev+2.pdf&type=publication](http://Ews.kemendag.go.id/download.aspx?file=131002_ANL_PBK_Bawang+Merah+Rev+2.pdf&type=publication). [20 Februari 2014].
- Monke, E.A. dan Pearson, S.R. (1989). *The Policy Analysis Matrix for Agricultural Development*. Cornell University, Ithaca.
- Rachmat, M. (2013). *Analisis Tata Niaga dan Tingkat Kepantasan Harga Bawang Merah di Indonesia*. Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian, Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian.